

STRATEGI MANAJEMEN PERSEDIAAN HALAL DALAM MITIGASI RISIKO GHARAR : TINJAUAN KEPATUHAN RANTAI PASOK BERBASIS SYARIAH

Muhammad Alif¹, Sultan Muhammad Hafidz², Venotty Ananda Putri³

Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3}

¹ muhammadalif.aee@gmail.com

² sultanmuhammadfiz3@gmail.com

³ venottyanandaputri234@gmail.com

Informasi artikel

Diterima :

10 Desember 2025

Direvisi :

31 Desember 2025

Disetujui :

19 Januari 2026

ABSTRACT

Halal inventory management within the supply chain faces critical challenges regarding Gharar (uncertainty) risks, which can undermine product integrity and the validity of muamalah contracts. This research aims to formulate a halal inventory management strategy as a mitigation mechanism for Gharar risks within the framework of Sharia Supply Chain Management (SSCM). The method employed is a Systematic Literature Review (SLR), analyzing indexed scientific literature and authoritative Sharia sources from 2020-2025. The results indicate that quality and quantity Gharar risks in warehousing can be effectively mitigated through the integration of modern operational strategies and Sharia principles. Key findings include the effectiveness of physical segregation to prevent ikhtilath, the application of Just-in-Time (JIT) philosophy to ensure Thayyib principles, and the use of traceability technology to ensure transparency (bayan) of product origin. This study concludes that Sharia-based inventory management is not merely formal regulatory compliance but a strategic model to ensure transactional fairness and blessings across the halal value chain.

Keywords : Halal Inventory Management, Sharia Supply Chain (SSCM), Gharar Risk, Traceability

PENDAHULUAN

Konsep Halal dalam Islam melampaui sekadar batasan konsumsi sehari-hari, tetapi mencakup seluruh spektrum kehidupan, mulai dari etika transaksi hingga implementasi manajemen operasional dalam perusahaan. Kehalalan tidak hanya menyangkut zat bahan baku, tetapi juga keseluruhan proses, perolehan dan pengelolaannya. Dalam lanskap industri modern, kepatuhan halal telah bertransformasi dari sekadar kewajiban religius menjadi standar kualitas global yang menuntut transparansi total. Halal menjadi landasan hukum yang menuntut kejujuran dalam berinteraksi, di mana setiap aktivitas ekonomi harus bebas dari unsur yang membahayakan kemaslahatan publik.



MRBIMA is licensed
under CC BY-SA 4.0

Prinsip Halal selalu disandingkan dengan konsep *Thayyib* (baik). Dimensi *Thayyib* memperluas standar operasional dengan mengintegrasikan parameter kualitas, higienitas, dan keamanan produk. Integrasi *Halalan-Thayyiban* ini menuntut adanya sistem pengawasan rantai pasok yang rigid, di mana manajemen persediaan menjadi titik paling krusial dalam menjaga integritas produk agar tidak mengalami degradasi mutu atau kontaminasi selama masa penyimpanan.

Dalam manajemen persediaan, *Gharar* bukan lagi sekadar istilah teoretis, melainkan risiko nyata yang muncul dari asimetri informasi stok, ketidakjelasan status kehalalan bahan baku di gudang, hingga risiko kontaminasi silang (*ikhtilath*) yang seringkali tidak terdeteksi secara fisik. Keberadaan *Gharar* dalam persediaan berpotensi mencederai keabsahan akad muamalah dan merusak kepercayaan konsumen terhadap sertifikasi produk akhir.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan Strategi Manajemen Persediaan Halal yang aplikatif dalam memitigasi risiko *Gharar*. Melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), studi ini akan menganalisis bagaimana strategi operasional seperti *segregation* dan *traceability* dapat berfungsi sebagai instrumen teknis untuk mengeliminasi ambiguitas. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis antara manajemen operasional modern dengan prinsip fiqh muamalah, guna memastikan integritas produk terjaga secara holistik sesuai dengan standar sistem jaminan produk halal yang berlaku.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Dasar Manajemen Persediaan

Manajemen persediaan merupakan bagian penting dari manajemen operasional yang berfokus pada menjaga jumlah persediaan yang tepat untuk menyeimbangkan biaya penyimpanan dan biaya kehabisan persediaan. Manajemen persediaan juga berperan sebagai fungsi sentral dalam sistem manajemen logistik yang berdampak langsung pada efisiensi organisasi. Octaviany & Gunawan (2023) menyoroti bahwa penggunaan teknologi informasi dalam manajemen persediaan dapat sangat mengurangi kesalahan pencatatan dan secara signifikan meningkatkan akurasi data persediaan. Peningkatan akurasi data ini memiliki implikasi penting bagi rantai pasok Syariah, dengan data yang akurat dan transparan, asimetri informasi antara penjual dan pembeli dapat dihilangkan, yang secara otomatis mengurangi risiko *Gharar* yang disebabkan oleh status atau lokasi barang yang tidak jelas. Meskipun Octaviany & Gunawan (2023) memfokuskan diskusi mereka pada efisiensi bisnis secara umum, namun temuan mereka tentang peran teknologi dalam menyediakan informasi stok yang jelas dapat diadopsi sebagai mekanisme teknis untuk memenuhi persyaratan objek transaksi yang jelas dalam kerangka syariah.

Ada beberapa model yang digunakan untuk mengelola persediaan. Sebagai contoh model *Just-in-Time* (JIT) bertujuan untuk menjaga tingkat persediaan serendah mungkin untuk mengurangi biaya penyimpanan dan risiko kerusakan. Eksplorasi terhadap sistem JIT menunjukkan bahwa efisiensi rantai pasok dicapai melalui penghapusan segala bentuk pemborosan (*waste*), ketidakkonsistenan, dan beban berlebih dalam proses operasional (Andriono dkk., 2025). Melalui JIT, produksi dan pengiriman barang hanya dilakukan saat ada permintaan nyata dari pelanggan, guna mengurangi stok berlebih. Dalam tinjauan syariah, upaya mengurangi pemborosan yang dipaparkan oleh Andriono et al. (2025) selaras dengan larangan sikap mubazir dalam pengelolaan harta kekayaan. Kontrol biaya yang ketat melalui JIT tidak hanya berperan secara ekonomi, tetapi juga memastikan pengelolaan sumber daya dilakukan secara efisien tanpa adanya barang yang terbuang di gudang. Ini secara langsung mendukung prinsip *thayyib*, di mana setiap barang dalam persediaan terjaga kualitasnya karena tidak ada penumpukan stok yang dapat merusak integritas produk dan menimbulkan *Gharar* dalam kualitas bagi konsumen akhir. Dengan demikian, sistem JIT yang efisien memudahkan pengawasan terhadap risiko pencampuran barang barang. Semakin sedikit barang yang

tersimpan, semakin besar transparansi informasi mengenai persediaan, sehingga potensi ketidakpastian (*gharar*) dalam kepatuhan syariah dapat dikurangi sejak awal.

Selain itu, waktu untuk memesan ulang diatur melalui *Reorder Point* (ROP), yang dihitung berdasarkan waktu tunggu dan tingkat permintaan. Dalam pengelolaan stok yang berlandaskan prinsip syariah, penentuan ROP tidak hanya berfungsi sebagai alat hitung untuk mempertahankan persediaan, tetapi juga sebagai langkah untuk mengurangi risiko *Gharar* dari ketersediaan barang. Dengan menentukan Safety Stock secara tepat, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya menjual barang yang tidak ada atau tidak jelas keberadaannya, sehingga memberikan jaminan kepada pelanggan terkait ketersediaan barang yang akan diperdagangkan (Muzakki et al., 2023).

Dalam konteks kualitas, persediaan harus memenuhi standar tertentu agar layak digunakan dan tidak menjadi pemborosan. Hal ini berhubungan erat dengan aspek *thayyib* dalam hukum islam, di mana setiap produk tidak hanya perlu halal secara substansi, tetapi juga harus dalam kondisi baik serta aman konsumen. Standar kualitas dari stok mencakup fisik, kinerja, dan masa simpan barang. Ketidakmampuan dalam mempertahankan kualitas, seperti membiarkan barang kedaluwarsa atau rusak dalam penyimpanan, dianggap sebagai tindakan mubazir yang dilarang dalam ajaran Islam. Pengawasan kualitas mencakup pemeriksaan serta penerapan teknologi digital untuk keperluan pelacakan. Analisis literatur menunjukkan bahwa rendahnya pengendalian kualitas secara langsung meningkatkan potensi *Gharar* kualitas, di mana terdapat ketidakpastian mengenai apakah barang yang disimpan masih layak dikonsumsi atau sudah menurun kualitasnya. Oleh karena itu, penerapan teknologi pelacakan menjadi sangat penting untuk menjamin kejelasan status *thayyib* barang selama berada dalam sistem persediaan.

Integrasi Prinsip Halalan-Thayyiban dan Mitigasi Risiko Gharar dalam Perspektif Muamalah

Dalam Islam, konsep Halal merupakan landasan moral dan hukum yang menuntut kejujuran serta transparansi dalam seluruh aktivitas ekonomi. Dalam operasional manajemen persediaan, kepatuhan terhadap aspek halal tidak hanya bersifat statis pada zat produk (*haram li-dzatih*), tetapi juga bersifat dinamis pada cara pengelolaan (*haram li-ghairihi*), di mana kegagalan menjaga integritas produk selama penyimpanan dapat membantalkan status kehalalannya (Tsani et al., 2021).

Prinsip Halal harus selalu disandingkan dengan *Thayyib* (baik, aman, higienis), yang memperluas tanggung jawab operasional hingga aspek kualitas, dan etika. Integrasi *Thayyib* ini menjadi landasan syariah bagi eliminasi *waste* dan penekanan kualitas modern. Produk yang mengalami degradasi mutu akibat penyimpanan yang buruk bukan lagi dianggap *thayyib*, sehingga dalam rantai nilai syariah, manajemen kualitas adalah bentuk ibadah profesional yang wajib dipenuhi untuk menjamin kemaslahatan konsumen (Dahlal, 2021).

Isu krusial yang harus dimitigasi dalam manajemen persediaan adalah Risiko *Gharar* (ketidakpastian). Secara umum, *Gharar* didefinisikan sebagai ambiguitas berlebihan dalam akad transaksi. Meskipun diskursus klasik sering membatasi *gharar* pada aspek akad, dalam konteks logistik modern, *Gharar Fahish* (ketidakpastian besar) bermanifestasi secara nyata pada ketidakjelasan spesifikasi barang di gudang. Ketika sistem persediaan gagal memberikan data akurat mengenai kondisi dan ketersediaan barang, maka terjadi pelanggaran terhadap hak informasi pembeli yang memicu ketidakadilan dalam bertransaksi (Shohih & Setyowati, 2021).

Dalam konteks Manajemen Persediaan, *Gharar* muncul dari beberapa aspek operasional. Analisis kritis terhadap temuan Damayanti et al. (2024) menunjukkan bahwa risiko fisik seperti pencampuran barang (*ikhtilath*) atau kerusakan tanpa pertanggungjawaban yang jelas adalah sumber utama *gharar* dalam gudang. Tanpa sistem *traceability* yang mumpuni, status kehalalan bahan baku menjadi syubhat (diragukan). Oleh karena itu, penghilangan *Gharar* dalam *Sharia-Based Supply Chain Management* bukan sekadar efisiensi teknis, melainkan

upaya menjaga kesahihan akad jual beli melalui penyediaan objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) yang jelas dan transparan.

Rantai Pasok Berbasis Syariah (*Sharia Supply Chain Management*)

Implementasi manajemen persediaan yang mampu memitigasi risiko *Gharar* hanya dapat terwujud jika terintegrasi dalam kerangka *Sharia Supply Chain Management* (SSCM). Eksistensi SSCM mengubah paradigma rantai pasok konvensional yang murni profit-oriented menjadi ekosistem yang berorientasi pada nilai *halal* (kesejahteraan hakiki). Dalam model ini, transparansi bukan sekadar instrumen manajerial untuk efisiensi, melainkan kewajiban syar'i untuk memastikan setiap pertukaran nilai bersih dari unsur *maysir* maupun ketidakpastian (*Gharar*) (Anggara et al., 2024; Wijayanto, 2024).

Titik kritis dalam operasional SSCM terletak pada Halal Logistics, khususnya pada aspek pergudangan dan penanganan barang. Prinsip utamanya adalah pemisahan fisik secara ketat (*segregation*) dan penjaminan kesucian (*thaharah*). Pengabaian terhadap protokol pemisahan barang di gudang secara otomatis memicu lahirnya *Gharar* kualitas, di mana status kehalalan produk menjadi *syubhat* akibat risiko kontaminasi silang. Oleh karena itu, adopsi standar HAS 23000 bukan lagi sekadar pemenuhan administratif untuk sertifikasi, melainkan mekanisme teknis untuk menjaga kepastian objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) sepanjang aliran barang (Saifuddin, 2020).

Untuk mengatasi ketidakjelasan asal-usul dan kondisi barang, mekanisme *traceability* (Ketertelusuran) memainkan peran yang sangat sentral. Sistem ketertelusuran yang mumpuni berfungsi sebagai instrumen *bayan* (penjelasan terang) dalam muamalah, yang memberikan visibilitas penuh terhadap pergerakan produk secara *real-time*. Dengan data yang dapat ditelusuri dari hulu ke hilir, asimetri informasi antara produsen dan konsumen dapat dieliminasi secara total. Pemanfaatan teknologi seperti *Blockchain* dan *RFID* memperkuat akurasi data ini. Karakteristik *Blockchain* yang tidak dapat diubah dan sulit untuk dipalsukan secara signifikan mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pencatatan inventaris. Teknologi ini mengalihkan pendekatan mitigasi *Gharar* dari yang bersifat reaktif menjadi pencegahan, di mana setiap ketidaknormalan dalam persediaan dapat segera dikenali sebelum sampai ke konsumen (Paliwal et al., 2020).

Keberhasilan mitigasi ini pada akhirnya bertumpu pada integritas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam pandangan syariah, karyawan gudang dan pengelola logistik berfungsi sebagai muhtasib yang bertanggung jawab untuk memastikan keaslian produk. Pematuhan syariah tidak dapat dicapai hanya dengan teknologi tanpa adanya kesadaran spiritual dari sumber daya manusia yang mengelolanya, oleh karena itu, keterampilan sumber daya manusia dalam manajemen rantai pasokan harus menggabungkan keahlian teknis dengan etika profesional (Saadah & Juharuddin, 2023).

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan ini bertujuan memposisikan penelitian ini di antara studi-studi relevan guna mempertegas kontribusi orisinal yang ditawarkan.

Pertama, Studi Integrasi Model Persediaan Syariah telah berupaya menyelaraskan model operasional konvensional dengan etika Islam. Gunardi (2023) menyoroti bahwa adaptasi model manajemen inventaris dalam kerangka bisnis Syariah merupakan bidang minat yang muncul guna memastikan praktik etis tanpa mengorbankan efisiensi. Namun, penelitian tersebut cenderung masih berada pada tataran konseptual umum, di mana penyelarasan JIT dan ROP lebih banyak dibahas dari sisi efisiensi biaya ketimbang fungsinya sebagai instrumen teknis kepatuhan hukum muamalah untuk mencegah keraguan (*syubhat*).

Kedua, Studi Implementasi *Halal Supply Chain Management* (HSCM) telah mengkaji tantangan praktis di lapangan. Febriyanni (2023) mengidentifikasi bahwa kendala utama dalam logistik halal berhubungan dengan standarisasi infrastruktur dan kerumitan pengawasan integritas produk dari awal hingga akhir. Di sisi lain, Bagundang dan Gallo (2024) menyoroti

bahwa pelacakan yang didukung oleh teknologi seperti RFID dan blog chain dapat memastikan produk sesuai dengan kriteria sertifikasi serta meningkatkan efisiensi dalam operasional. Namun demikian penelitian penelitian tersebut masih sangat berfokus pada teknologi dan belum secara mendalam menggambarkan bagaimana integrasi teknologi ini berfungsi sebagai alat untuk menetralkan risiko Gharar secara langsung dalam kegiatan operasional gudang.

Kekurangan dalam penelitian yang teridentifikasi menunjukkan bahwa walaupun gharar telah dibahas secara mendalam dalam konteks teoritis Fiqh Muamalah dan HSCM telah dianalisis dari segi operasional, masih ada sedikit penelitian yang secara tegas mengaitkan taktik pengelolaan persediaan harian (seperti pemisahan fisik dan kontrol inventaris) sebagai alat mitigasi langsung terhadap risiko gharar. Studi ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan tersebut dengan menyediakan model strategi yang secara menyeluruh dapat menetralkan garam di setiap tahap persediaan sambil memberikan tinjauan mengenai kepatuhan yang lebih aplikatif berdasarkan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode Studi Literatur Sistematis (*Systematic Literature Review* - SLR). Dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyatukan literatur yang berhubungan dengan cara manajemen persediaan dalam mengatasi risiko Gharar. Metode ini dilakukan secara terstruktur agar dapat mengumpulkan, menilai, dan mengolah bukti yang relevan dari kajian-kajian sebelumnya (Executive Learning Hub Pascasarjana Unair, 2024). Proses SLR dalam penelitian ini terdiri atas langkah-langkah berikut:

Menetapkan Pertanyaan Penelitian:

1. Merumuskan isu utama mengenai cara strategi (seperti JIT, ROP, dan pelacakan) dapat diterapkan sebagai alat teknis untuk mengurangi risiko Gharar terkait kualitas dan kuantitas dalam rantai pasokan halal.
2. Strategi Pengumpulan Data: Data diperoleh melalui pencarian literatur di basis data jurnal akademik seperti Google Scholar dan platform jurnal bereputasi lain. Istilah yang digunakan termasuk: "Gharar dalam Rantai Pasokan", "Pengelolaan Persediaan Halal", "Logistik Halal", dan "Mitigasi Gharar".
3. Pemilihan dan Kriteria: Artikel yang dianalisis dibatasi pada publikasi antara tahun 2020 hingga 2025 untuk menjamin relevansi data, serta harus memiliki hubungan yang kuat dengan integrasi manajemen operasional dan prinsip Syariah.
4. Sintesis Data: Melakukan analisis menyeluruh terhadap literatur yang dipilih untuk mengidentifikasi hubungan antara teknik persediaan dan pengurangan elemen Gharar, demi merancang model strategi yang dapat diterapkan dalam sektor industri.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Manajemen Persediaan Halal sebagai Strategi Pengendalian Syariah

Manajemen rantai pasokan halal merupakan sistem pengelolaan terintegrasi yang menjamin kepatuhan syariat Islam pada setiap langkah operasional. Dalam konteks ini, Manajemen Persediaan Halal bertransformasi menjadi sistem pengendalian kepatuhan syariah (*Sharia compliance control*), bukan sekadar instrumen logistik untuk menjamin ketersediaan barang.

Prinsip utama pengelolaan persediaan menurut Islam menekankan pada kejelasan (*bayan*) dan amanah. Strategi perencanaan stok harus didasarkan pada proyeksi permintaan yang realistik guna menghindari spekulasi yang mendekati unsur *maysir*. Analisis terhadap model *Reorder Point* (ROP) menunjukkan bahwa penetapan titik pesan yang akurat berfungsi sebagai alat perlindungan bagi hak konsumen. Dengan ketersediaan stok yang pasti,

perusahaan menghindari risiko *Gharar* dalam transaksi jual beli barang yang tidak ada atau tidak pasti ketersediaannya (*bay' al-ma'dum*). Hal ini selaras dengan upaya menciptakan kebaikan (*thayyib*) dan menghindari kerugian dalam aktivitas ekonomi (Farikhin & Mulyasari, 2022).

Integrasi konsep *Just-in-Time* (JIT) dalam persediaan halal memainkan peran vital dalam memitigasi *Gharar* kualitas. Sesuai dengan temuan Andriono dkk. (2025) mengenai pengendalian biaya, JIT yang menekan stok hingga tingkat minimal secara langsung mengurangi risiko barang rusak atau kedaluwarsa di gudang. Dalam perspektif operasional, barang yang menumpuk terlalu lama meningkatkan ketidakpastian kondisi fisik produk. Dengan menerapkan sistem yang ramping (*Lean*), perusahaan memastikan bahwa produk yang sampai ke tangan konsumen adalah produk yang segar dan terjaga kualitasnya, sehingga menutup celah asimetri informasi mengenai kondisi cacat barang yang tersembunyi.

Pengendalian syariah yang paling fundamental dalam manajemen persediaan adalah pemisahan fisik (*segregation*). Analisis terhadap operasional gudang menunjukkan bahwa risiko *Gharar* sering muncul akibat pencampuran barang (*ikhtilath*) yang mengakibatkan keraguan terhadap status kehalalan produk. Penggunaan teknologi pelacakan (*traceability*) memungkinkan pengawasan yang ketat terhadap lokasi dan identitas barang secara *real-time*. Hal ini memberikan jaminan transparansi penuh, di mana setiap pergerakan stok dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menghilangkan unsur *syubhat* yang dapat merusak integritas rantai pasok halal secara keseluruhan (Dahlal, 2021; Tsani et al., 2021).

Manifestasi *Gharar* dan Respons Strategis Melalui Akad

Gharar (ketidakpastian) merupakan risiko utama dalam pengelolaan persediaan, muncul ketika terdapat ambiguitas mengenai ketersediaan, kualitas, atau jadwal pengiriman barang, yang berpotensi merugikan salah satu pihak (Shohih & Setyowati, 2021). Dalam praktik operasional, *Gharar* seringkali bermanifestasi dalam bentuk *asymmetry of information* antara data di sistem (*inventory record*) dengan stok fisik di gudang. Praktik spekulatif seperti penimbunan barang (*ihtikar*) atau ketidakpastian waktu tunggu (*lead time*) tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dalam bertransaksi. Untuk memitigasi risiko tersebut, manajemen persediaan halal harus memperkuat kepastian transaksi melalui transformasi operasional yang didasarkan pada akad-akad Syariah.

Akad Salam memaksa manajemen persediaan untuk memiliki kontrol kualitas yang sangat ketat sejak awal. Karena pembayaran dilakukan di muka, perusahaan berkewajiban menjamin bahwa barang yang akan tersedia di masa depan memiliki spesifikasi (*sifat*) yang presisi. Hal ini mendorong penerapan standar *Quality Control* yang lebih tinggi untuk menghindari *Gharar* kualitas saat penyerahan barang dilakukan.

Dalam Akad Istisna', persediaan bahan baku harus dikelola secara *real-time* sesuai dengan progres manufaktur. Strategi ini secara langsung mengadopsi prinsip *Just-in-Time* (JIT), di mana ketidadaan stok bahan baku atau keterlambatan produksi akan menimbulkan kerugian bagi pemesan. Dengan demikian, Istisna' berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang meminimalisir spekulasi stok dan memastikan efisiensi penggunaan sumber daya tanpa pemborosan (*tabzir*).

Dalam skema Murabahah, syarat utama sahnya akad adalah penjual harus memiliki (*taqabdu*) barang tersebut secara sempurna sebelum dijual kembali. Secara operasional, hal ini menuntut sistem manajemen persediaan yang mampu membuktikan kepemilikan fisik dan legal barang di gudang. Penggunaan teknologi pelacakan (*traceability*) menjadi vital di sini untuk membuktikan bahwa barang tidak sedang dalam sengketa atau belum dimiliki, sehingga menghilangkan risiko *Gharar* dalam status kepemilikan barang.

Sintesis atas penerapan akad-akad ini menunjukkan bahwa mitigasi *Gharar* bukan hanya tanggung jawab departemen legal, melainkan tanggung jawab operasional manajer gudang. Setiap data stok yang tidak akurat pada dasarnya adalah potensi *Gharar* yang dapat

membatalkan keabsahan akad muamalah. Oleh karena itu, digitalisasi persediaan bukan sekadar tren teknologi, melainkan kebutuhan syar'i untuk menegakkan prinsip transparansi (*transparency*) dan akuntabilitas dalam rantai pasok halal.

Strategi Operasional dalam Mitigasi *Gharar*

Mitigasi *gharar* tidak hanya terbatas pada akad, tetapi juga menuntut implementasi strategi operasional yang mengintegrasikan aspek fisik dan audit. Risiko *Gharar* seringkali bermanifestasi secara fisik di area pergudangan dalam bentuk *ikhtilath* (pencampuran) atau kerusakan barang yang tidak terdeteksi (Damayanti et al., 2024). Sebagai respons strategis, Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) mewajibkan penerapan pemisahan fisik (*segregation*) yang tegas. Secara teknis, segregasi ini berfungsi sebagai instrumen eliminasi ketidakpastian status produk, sehingga setiap item persediaan memiliki identitas yang jelas dan terverifikasi kehalalannya sebelum memasuki tahap distribusi.

Adaptasi model *Just-in-Time* (JIT) menjadi strategi operasional berikutnya yang sangat relevan. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang hanya mengejar efisiensi, JIT dalam perspektif syariah sebagaimana dianalisis oleh Andriono et al., (2025) berperan dalam penghapusan *muda* (pemborosan) yang sejalan dengan prinsip *thayyib*. Dengan meminimalkan tingkat stok di gudang, perusahaan secara drastis mengurangi potensi barang kedaluwarsa atau mengalami degradasi kualitas yang tersembunyi. Hal ini merupakan upaya preventif terhadap munculnya *Gharar* kualitas, di mana konsumen seringkali tidak mengetahui kondisi internal barang yang telah disimpan terlalu lama di gudang.

Selanjutnya, untuk mengatasi *Gharar* yang disebabkan oleh ketidakjelasan asal-usul, diperlukan Transparansi Data melalui Sistem *Traceability*. Implementasi sistem informasi terintegrasi, seperti *Halal Warehouse Management System* (HWMS) atau teknologi *blockchain*, memungkinkan pelacakan setiap pergerakan barang secara *real-time* (Paliwal et al., 2020). Visibilitas data ini merupakan perwujudan prinsip *bayan* (kejelasan) dalam transaksi. Dengan data yang akurat, perusahaan dapat menghindari praktik *bay' al-ma'dum* (menjual barang yang secara fisik tidak tersedia atau rusak) dan memberikan jaminan keaslian produk. Selain itu, seleksi pemasok yang ketat dan tersertifikasi menjadi filter awal untuk memitigasi risiko *Gharar* dari hulu, memastikan bahwa setiap input dalam sistem persediaan telah bersih dari unsur *syubhat* sejak tahap pengadaan.

Kepatuhan Rantai Pasok dan Kontribusi Penelitian

Keberhasilan implementasi strategi manajemen persediaan dalam kerangka *Sharia Supply Chain Management* (SSCM) tidak hanya diukur dari efisiensi logistik, tetapi dari sejauh mana sistem tersebut mampu menegakkan empat prinsip utama yakni *Halal Integrity*, *Transparency*, *Accountability*, dan *Fairness*. Dalam operasional persediaan, ketaatan ini menjadi variabel determinan bagi keberlanjutan bisnis halal. Kepatuhan syariah yang terjaga secara konsisten di tingkat gudang akan membangun kepercayaan (*trust*) konsumen yang lebih kuat, karena adanya jaminan bahwa produk tidak hanya halal secara label, tetapi juga *thayyib* secara proses.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dengan mensintesikan strategi operasional persediaan menjadi model "Anti-Gharar" yang terukur. Melalui analisis yang telah dipaparkan, strategi manajemen persediaan halal terbukti memiliki implikasi multidimensi, yaitu Efisiensi Operasional melalui Nilai Ibadah: Penghapusan pemborosan (*muda*) bukan hanya soal menekan biaya, melainkan upaya menghindari perilaku *tabzir* yang dilarang. Lalu Mitigasi Risiko *Gharar*: Penggunaan teknologi *traceability* dan sistem JIT secara teknis menutup celah asimetri informasi, sehingga setiap transaksi didasarkan pada data ketersediaan dan kualitas barang yang pasti (*bayan*). Dan terakhir Keunggulan Kompetitif dan Reputasi: Kepatuhan regulatif terhadap SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global yang semakin menuntut transparansi rantai pasok.

Secara lebih mendalam, penerapan strategi ini merupakan manifestasi dari *Maqasid al-Syariah*, khususnya dalam aspek *Hifdz al-Mal* (perlindungan harta) dan *Hifdz al-Anfs* (perlindungan jiwa melalui konsumsi barang yang aman dan thayyib). Dengan demikian, manajemen persediaan berbasis syariah bukan sekadar upaya kepatuhan formal terhadap regulasi negara, melainkan komitmen etis dan spiritual untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang berkelanjutan. Model yang dirumuskan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi praktisi industri dalam mentransformasi operasional pergudangan menjadi instrumen syar'i yang menjamin keberkahan dalam seluruh rantai nilai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen persediaan berbasis Syariah bukan sekadar bentuk kepatuhan administratif, melainkan instrumen mitigasi risiko *Gharar* yang terukur dalam ekosistem *Sharia Supply Chain Management* (SSCM). Temuan kunci menunjukkan bahwa risiko *Gharar* operasional baik dalam aspek kuantitas (*bay' al-ma'dum*) maupun kualitas (*ikhtilath*) dapat dieliminasi secara efektif melalui integrasi strategi manajemen modern dan prinsip Fiqh Muamalah. Secara operasional, penerapan pemisahan fisik yang sesuai standar logistik halal terbukti menjadi solusi utama dalam mengatasi ketidakpastian status produk. Sementara itu, adaptasi filosofi *Just-in-Time* (JIT) yang berorientasi pada eliminasi pemborosan secara preventif menjaga dimensi *Thayyib* dengan menekan risiko degradasi kualitas barang di gudang. Lebih lanjut, penggunaan teknologi *traceability* serta penerapan akad muamalah yang presisi berfungsi sebagai penjamin transparansi (*bayan*) dan akuntabilitas kepemilikan. Dengan demikian, model manajemen persediaan yang dirumuskan dalam studi ini mampu mewujudkan integritas produk dan keadilan transaksi yang selaras dengan nilai-nilai *Maqasid al-Syariah*.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diajukan. Bagi praktisi industri, perusahaan disarankan untuk tidak hanya berfokus pada audit sertifikasi akhir, tetapi mulai mengintegrasikan metrik mitigasi *Gharar* operasional ke dalam *Key Performance Indicators* logistik, termasuk investasi pada *Halal Warehouse Management System* (HWMS) guna memastikan visibilitas stok secara *real-time*. Di sisi lain, regulator dan lembaga sertifikasi perlu merumuskan standar Jaminan Produk Halal (SJPH) yang lebih eksplisit dalam mengatur prosedur pencegahan *Gharar Fahish*, terutama mengenai mekanisme pertanggungjawaban atas kerusakan barang di sepanjang rantai pasok. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi empiris berbasis data lapangan melalui metode studi kasus pada industri manufaktur untuk menguji efektivitas model mitigasi ini secara kuantitatif serta mengukur pengaruhnya terhadap kinerja finansial perusahaan dan tingkat kepercayaan konsumen secara jangka panjang.

Dalam penyusunan naskah ini, penulis menggunakan bantuan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) sebagai alat pendukung untuk memperbaiki struktur penulisan, memperhalus tata bahasa, dan membantu mensintesis draf awal berdasarkan literatur yang telah dikumpulkan secara mandiri. Meskipun demikian, seluruh pemilihan referensi, analisis kritis terhadap Fiqh Muamalah, penentuan celah penelitian (*research gap*), serta penarikan kesimpulan dilakukan sepenuhnya oleh penulis dengan pengawasan intelektual yang ketat. Penulis bertanggung jawab penuh atas validitas data, interpretasi hasil, dan integritas konten yang disajikan dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Abiola-Adams, O., Azubuike, C., Sule, A. K., & Okon, R. (2024). Risk Management and Hedging Techniques in Islamic Finance: Addressing Market Volatility without Conventional Derivatives. *International Journal of Multidisciplinary Research and*

- Growth Evaluation*, 5(1), 1148–1157. <https://doi.org/10.54660/ijmrge.2024.5.1.1148-1157>
- Andriono, M. R., Alindah, G., Agustriani, L., Ayuningtyas, R., Kurnia, R. H., & Ipijei, I. (2025). Eksplorasi Pengaruh Sistem Just-in-Time (JIT) terhadap Pengendalian Biaya dalam Rantai Pasokan. *Jurnal Manajemen, Bisnis & Akuntansi*, 2(1), 33–45.
- Anggara, A., Kaukab, M., & Randikaparsa, I. (2024). Optimizing Halal Supply Chains in the Food Industry: Enhancing Sales Management through ERP System Integration. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i21219>.
- Bagundang, E. P., & Gallo, M. D. (2024). Technological Advancements in Halal Ecosystem: Harnessing Information Technology for Certification and Traceability. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(2). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i02.17620>
- Dahlal, N. (2021). An Ideal Halalan Tayyiban Food Quality Management (HTFQM) Principles. *Halalpshere*. <https://doi.org/10.31436/hs.v1i2.31>.
- Damayanti, E., P, B., & Teguh, H. (2024). Penerapan Akuntansi Persediaan Pada PT Hutama Neala Di Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.30640/abdimas45.v3i1.2315>.
- Executive Learning Hub Pascasarjana Unair. (2024, 26 Maret). *System Literature Review (SLR)*. Diperoleh pada tanggal 27 Desember 2025 dari URL: <https://elh.pasca.unair.ac.id/system-literature-review/>
- Farikhin, A., & Mulyasari, H. (2022). Gharar, Fraud and Dispute in Islamic Business Transaction an Islamic Law Perspectives. *International Economic and Finance Review*. <https://doi.org/10.56897/iefr.v1i2.18>.
- Farina, G., Kocian, A., Brunori, G., Chessa, S., Lai, M., Nardi, D., Schifanella, C., Bonura, S., Masi, N., Comella, S., Ambrosino, F., Mariano, A., Colizzi, L., Dimitri, G., Gori, M., Scarselli, F., Bonomi, S., Almici, E., Antiga, L., Fiorentino, A., & Moreschi, L. (2025). Interoperable Traceability in Agrifood Supply Chains: Enhancing Transport Systems Through IoT Sensor Data, Blockchain, and DataSpace. *Sensors (Basel, Switzerland)*, 25. <https://doi.org/10.3390/s25113419>.
- Febriyanni, R. (2023). Perkembangan Logistik Halal. *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 21–30.
- Gunardi, S. (2023). The Role of Shari'ah Principles in Guaranteeing Halal Logistics: A Review. *Halalpshere*, 3(1), 40–46. <https://doi.org/10.31436/hs.v3i1.36>
- Hastig, G., & Sodhi, M. (2020). Blockchain for Supply Chain Traceability: Business Requirements and Critical Success Factors. *Production and Operations Management*, 29, 935 - 954. <https://doi.org/10.1111/poms.13147>.
- Muzakki, K., Kumalasari, I., & Wicaksono, A. (2023). ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BERDASARKAN ABC CLASS-BASED DENGAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) DAN REORDER POINT (ROP). *Majalah Ekonomi*. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol27.no2.a6339>.
- Octaviany, T., & Gunawan, A. (2023). Mengoptimalkan Manajemen Persediaan Melalui Teknologi Rantai Pasokan. *Journal Of Informatics And Busisnes*, 1(3), 150–155. <https://doi.org/10.47233/jibs.v1i3.429>
- Paliwal, V., Chandra, S., & Sharma, S. (2020). Blockchain Technology for Sustainable Supply Chain Management: A Systematic Literature Review and a Classification Framework. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su12187638>.
- Saadah, K., & Jaharuddin. (2023). STRATEGI MANAJEMEN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN ULUMUDDIN SUSUKAN CIREBON. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan*, 1(2), 27–41. <https://doi.org/10.37567/borneo.v5i1.3355>

- Saifuddin, W. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia (Halal Certification and Its Implications for Halal Product Business in Indonesia). . <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH. *Dialogia*, 12, 69-82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>.
- Tsani, A., Susilo, H., Suyamto, S., Setiawan, U., & Sudanto, S. (2021). HALAL AND THAYYIB FOOD IN ISLAMIC SHARIA PERSPECTIVE. *International Journal Mathla 'ul Anwar of Halal Issues*. <https://doi.org/10.30653/ijma.202111.34>.
- Wijayanto, H. (2024). Designing a Supply Chain Management Model for Sharia Medical Textile Products Study at PT XYZ. *Jurnal Tekstil: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Bidang Tekstil dan Manajemen Industri*. <https://doi.org/10.59432/jute.v7i2.100>.